

**ANALISIS IMPLEMENTASI SKEMA
RESOURCE-FOR-INFRASTRUCTURE (RFI) DALAM PERJANJIAN
SICOMINES ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO DENGAN
TIONGKOK**

(SKRIPSI)

Oleh

**HERMAWAN ADI PRATAMA
2216071011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI SKEMA *RESOURCE-FOR-INFRASTRUCTURE (RFI)* DALAM PERJANJIAN SICOMINESANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO DENGAN TIONGKOK

Oleh

Hermawan Adi Pratama

Perjanjian *Sicomines* antara Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok adalah bentuk kerja sama ekonomi internasional yang menerapkan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, pertukaran sumber daya alam dengan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul banyak permasalahan yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara target pembangunan infrastruktur serta realisasi yang dicapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perjanjian *Sicomines*, mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan, serta menjelaskan keterkaitan antara dinamika implementasi dan hasil pembangunan infrastruktur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui sumber sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan konsep implementasi perjanjian internasional, kerja sama ekonomi internasional, skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, dan teori interpedensi asimetris. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi Perjanjian *Sicomines* belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal perjanjian. Lemahnya kapasitas institusional, rendahnya transparansi, ketimpangan posisi tawar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian *Sicomine* sbelum berjalan secara optimal akibat lemahnya kapasitas institusional, rendahnya transparansi, dan ketimpangan posisi ttawar yang menciptakan hubungan hubungan interpedensi asimetris antara kedua negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* dalam Perjanjian *Sicomines* dalam pembangunan ini terdapat ketidaksesuaian dalam janji komitmen perjanjian dengan target pembangunan bagi Republik Demokratik Kongo karena masih terdapat kesenjangan antara desain perjanjian dan pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Sicomines*, *Resource-for-infrastructure (RFI)*, Kerja sama Ekonomi Internasional, Interdependensi Asimetris.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RESOURCE-FOR-INFRASTRUCTURE (RFI) IN THE SICOMINES AGREEMENT BETWEEN DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO WITH TIONGKOK

By

Hermawan Adi Pratama

The Sicomines Agreement between the Democratic Republic of the Congo and Tiongkok is a form of international economic cooperation that implements the Resource-for-Infrastructure (RFI) scheme, the exchange of natural resources for infrastructure development. However, in its implementation, many problems have emerged, characterized by a mismatch between infrastructure development targets and actual results. This study aims to analyze the implementation of the Sicomines Agreement, identify factors that influence its implementation, and explain the relationship between implementation dynamics and infrastructure development outcomes. The study used a qualitative method with a case study approach. Data were obtained from relevant secondary sources. Data analysis was conducted descriptively and analytically using the concepts of international agreement implementation, international economic cooperation, the Resource-for-Infrastructure (RFI) scheme, and the theory of asymmetric interdependence. The results show that the implementation of the Sicomines Agreement has not fully aligns with the initial objectives of the agreement. Weak institutional capacity, low transparency, and unequal bargaining power are among the challenges. The results of the study indicate that the implementation of the Sicomines Agreement has not been running optimally due to weak institutional capacity, low transparency, and imbalanced bargaining positions that create asymmetric interdependence relationships between the two countries. This study concludes that the Resource-for-Infrastructure (RFI) scheme in the Sicomines Agreement in this development has a discrepancy in the promise of the agreement's commitment to the development targets for the Democratic Republic of Congo because there is still a gap between the agreement's design and its implementation.

Keywords : Sicomines, Resource-for-Infrastructure (RFI), International Economic Cooperation, Asymmetric Interdependence.

**ANALISIS IMPLEMENTASI SKEMA
RESOURCE-FOR-INFRASTRUCTURE (RFI) DALAM PERJANJIAN
SICOMINESANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO DAN
TIONGKOK**

Oleh

**HERMAWAN ADI PRATAMA
NPM. 2216071011**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS IMPLEMENTASI SKEMA
RESOURCE-FOR-INFRASTRUCTURE (RFI)
DALAM PERJANJIAN SICOMINES ANTARA
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
DENGAN TIONGKOK**

Nama Mahasiswa

: **Hermawan Adi Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216071011**

Program Studi

: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A

NIP. 198604282015041004

Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A

NIP. 192008252014041001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

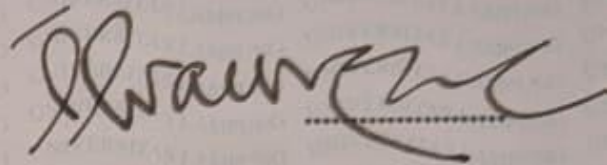
Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A

NIP. 198106282005011003

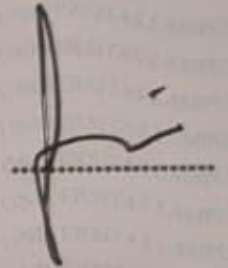
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

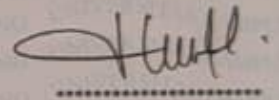
Ketua : Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A.



Penguji Utama : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan in saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 22 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Hermawan Adi Pratama

NPM. 2216071011

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2026 di Kota Metro, dengan nama lengkap Hermawan Adi Pratama. Penulis merupakan anak pertama di keluarga dan sebagai kakak dari adik. Sekitar pada tahun 2009, penulis menempuh jenjang pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak (TK) Wahdatuk Ummah Kota Metro. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Metro Timur, dan melanjutkan kembali pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMP) Negeri 2 Kota Metro pada tahun 2016. Dan penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Kota Metro pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022.

Dan pada akhirnya atas usaha dan izin Allah SWT pada tahun 2022 penulis diterima jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri dan secara resmi terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama masa perkuliahan penulis pernah mengikuti penerimaan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung, akan tetapi tidak melanjutkan sebagai anggota. Penulis juga telah mengikuti kegiatan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 30 hari di desa Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu penulis pernah mengikuti kegiatan magang di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tepatnya di Bulog Kantor Wilayah Lampung.

MOTTO

“Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya”

(QS. Al-Anbiya : 37)

“Jangan tinggal di masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan, tapi pusatkan pikiran pada saat ini”

(Buddha Gautama)

“Di akhir jalan akan ada kebebasan maka bersabarlah sampai tiba pada waktunya”

(Buddha Gautama)

“Hidup ini bukan tentang menjadi terbaik, tapi tentang menjadi lebih baik dari dirimu kemarin”

(Buddha Gautama)

“Sebagai manusia, saya sadar dengan sifat tergesa-gesa. Namun lewat skripsi ini, saya belajar fokus pada saat ini dan bersabar untuk proses demi kebebasan di akhir jalan. Sebab bagi saya ini bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, tapi menjadi lebih baik dari hari kemarin”

(QS. Al-Anbiya: 37 & Buddha Gautama)

PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan yang maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai karya sederhana yang penuh dengan perjuangan dan kesabaran dan ungkapan rasa sayang dan bakti kepada:

Bapak tercinta dan ibu yang aku sayangi yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan selalu mencurahkan rasa sayang tanpa henti, selalu memberikan saya pelajaran bagaimana menjadi manusia yang terbaik, serta dalam doa dan sujud selalu menantikan keberhasilan dengan sabar.

Adikku Pradito Dwi Saputra bahkan semua seluruh keluarga besarku atas rasa sayang, doa, perhatian, pengertian, pengorbanan, dan dorongan semangat tulus, serta persaudaraan yang tak tergantikan.

Teman dan sahabatku yang selalu membantu serta memberikan dukungan akan keberhasilanku.

Dan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, beserta staff Jurusan Hubungan Internasional

Almamater yang saya cintai, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT dengan berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Analisis Implementasi Skema *Resource-for-Infrastructure* dalam Perjanjian *Sicomines* antara Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Tanpa adanya doa dan dukungan dari orang-orang terdekat, serta bimbingan dan nasehat dari Bapak/Ibu dosen sekalian. Maka dari itu, sebagai wujud rasa hormat peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Hasbi Sicik, S.I.P., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang membantu proses selama penelitian dan juga bersedia memberikan waktu untuk membimbing. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua

yang Bapak berikan pada penulis, semoga kesehatan dan rezeki menyertai Bapak Aamiin.

8. Bapak Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang senantiasa memberikan saran dan motivasi selama penyusunan skripsi . Bahkan di luar bimbingan, beliau juga menjadi tempat berdiskusi, serta banyak memberikan masukan untuk langkah kedepannya. Semoga seluruh kebaikan atas apa yang Bapak berikan menjadi bermanfaat bagi saya Aamiin.
9. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kebaikan serta arahnya. Selama proses perbaikan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sikap Ibu yang baik, dan terbuka.
10. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama menempuh masa perkuliahan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya.
12. Kedua Orang Tua yang penulis cintai dan sayangi. Ayah Nasib Rohman dan Ibu Poniym terima kasih telah memberikan semua hal dan senantiasa mendukung dan mengusahakan yang terbaik. Serta adik tercintai Pradito Dwi Saputra yang selalu menghibur. Semoga kebaikan yang telah keluarga saya berikan mendapatkan kebaikan yang setimpal dan selalu senantiasa di berikan keberkahan oleh ALLAH SWT Aamiin.
13. Untuk Paman yang saya sayangi terima kasih telah memberikan dukungan serta doanya bahkan mengusahakan untuk keberhasilan selama penulis. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan dan rezeki Aamiin.
14. Fina Novika Putri, yang menjadi sahabat terbaik serta telah kebersamai di saat senang dan duka, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya selama masa perjuangan ini.
15. Selawati, Made Desma Pratiwi, Brena Larasati, dan Putri Mayang Sari yang sudah menjadi teman baik selama perkuliahan ini, terima kasih telah menjadi tempat bermain.

16. Dimas Fajar Baskoro, teman yang sudah memberikan dukungan dan semangat selama menyusun skripsi ini.
17. Okta Rio Romadan yang sudah menjadi teman dan memberikan dukungan selama ini.
18. Dan terakhir saya ingin berterima kasih pada seorang yang selama ini selalu tidak pernah berhenti untuk berjuang di titik ini demi untuk mengejar impiannya. Yaitu diri saya sendiri Hermawan Adi Pratama. Anak laki laki yang memiliki impian untuk menjadi Sarjana Pertama di keluarganya, jangan pernah untuk berhenti berjuang demi bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya, terima kasih atas semua pencapaiannya, saya berdoa agar diri ini bisa menjadi orang yang bermanfaat nantinya dan di kelilingi selalu oleh orang-orang baik dan hebat, serta saya menyakinkan diri ini pasti dapat mencapai impiannya Aamiin.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teoritis dan Konseptual	13
2.2.1 Teori Interdependensi Asimetris	14
2.2.2 Konsep Kerja Sama Ekonomi Internasional	15
2.2.3 Konsep Implementasi Perjanjian Internasional	17
2.2.4 Konsep Skema <i>Resource-for-Infrastructure (RFI)</i>	19
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Jenis Sumber Data	28
3.3.1 Jenis Data	29
3.3.2 Sumber Data.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Perjanjian <i>Sicomines</i>	36
4.2. Analisis Skema <i>Resource-for-Infrastructure (RFI)</i> dalam Perjanjian <i>Sicomines</i>	39

4.2.1	Mekanisme Pelaksanaan Skema <i>Resource-for-Infrastructure (RFI)</i>	39
4.2.2	Implementasi Perjanjian <i>Sicomines</i> dalam Skema <i>Resource-for Infrastructure(RFI)</i>	44
4.2.3	Penyebab Ketidaktercapainya Pembangunan Infrastruktur di Perjanjian <i>Sicomines</i>	50
4.2.4	Analisis Interdependensi Asimetris dalam Pelaksanaan Perjanjian <i>Sicomines</i>	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		65
5.1	Kesimpulan	65
5.2.	Saran.....	68
1.	Saran Akademis.....	68
2.	Saran Praktisi bagi Republik Demokratik Kongo	68
3.	Saran bagi Model Kerja Sama <i>Resource-for-Infrastructure (RFI)</i>	68
DAFTAR PUSTAKA		69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	23
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Garis Waktu Perkembangan Perjanjian <i>Sicomines</i>	44
Tabel 4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Mineral <i>Sicomines</i> Periode 2008-2015	45
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Infrastruktur.....	46
Tabel 4.4 Persentase dari Target dan Realisasi Infrastruktur.....	47
Tabel 4.5 Fluktuasi Harga Mineral Strategis Global	61

DAFTAR SINGKATAN

CREC	: Tiongkok Railway Engineering Corporation
EITI	: Extractive Industries Transparency Initiative
EXIM BANK	: Export-Import Bank of Tiongkok
IGF	: Inspection Générale des Finances
IMF	: International Monetary Fund
ITIE-RDC	: Initiative pour la Transparencedans les Industries Extractives en République Démocratique du Congo
RDK	: Republik Demokratik Kongo
RFI	: Resource-for-Infrastructure
SPRL	: Société Privée à Responsabilité Limitée
USD	: United States Dollar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara di dunia yang menjalin kerja sama paling banyak di benua Afrika khususnya di bidang ekonomi. Bidang kerja sama ekonomi tersebut ada di sektor perdagangan dan investasi antara Tiongkok dan Afrika. Nilai perdagangan serta investasi ini berbeda-beda setiap negaranya, salah satunya ada di Nigeria yang mencatat nilai investasi dan perdagangannya ada di USD 2 miliar pada tahun 2000 dan kemudian meningkat menjadi USD 20 miliar pada tahun 2020 (Chinomso & Bamidele, 2025), Afrika selatan mencapai USD 1 miliar tahun 2000 dan meningkat menjadi USD 34 miliar 2023 (Ngundu, 2025). Dan ada beberapa negara lagi seperti Ethiopia yang dari USD 100 juta 2002 naik menjadi USD 5 miliar pada tahun 2024 (Trading Economics, 2025). Tidak hanya di sektor perdagangan, pihak Tiongkok juga berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap keuangan ke Angola sebesar USD 2 miliar pada tahun 2004 (Fabbri, 2022). Jika dilihat dari kondisi tersebut Tiongkok sangat berperan aktif dalam hubungan ekonomi dan sebagai negara penyedia sumber pinjaman.

Hubungan ini kemudian berkembang ketika Republik Demokratik Kongo menjadi negara utama dari hubungan Tiongkok dengan Afrika, kedua negara ini menjalin hubungan di sektor ekonomi dengan Tiongkok memberikan bantuan keuangan sebesar 20% dari total utang Republik Demokratik Kongo (Mutia, 2025). Selain di bidang ekonomi, Tiongkok dengan Republik Demokratik Kongo menjalin perdagangan, dengan nilai awal perdagangan mencapai USD 21 miliar tahun 2000 menjadi USD 27 miliar pada tahun 2004 (Chinomso & Bamidele, 2025). Di sektor perdagangan antara kedua negara ini lebih didominasi dari ekspor mineral tembaga, nilai ekspor tembaga ini mencapai 99 juta metrik per ton dan untuk nilai kobalt menyentuh 170.000 ton pada tahun 2023, sumber daya mineral ini sangat dibutuhkan bagi perindustrian Tiongkok (Metal.com). Situasi ini dapat

membuktikan bahwa Republik Demokratik Kongo mempunyai posisi cukup strategis sebagai negara pemasok sumber daya mineral untuk Tiongkok dalam hubungan kerja sama kedua negara.

Kemudian kedua negara ini menjalin kerja sama di sektor perdagangan dan investasi infrastruktur. Kerja sama ini menggunakan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, sumber daya mineral strategis dengan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Tiongkok menjadi negara utama untuk menyediakan modal dan pembangunan, seperti jalan nasional, rumah sakit, dan pembangunan lainnya, dan ditukar dengan kebutuhan sumber daya mineral seperti kobalt dan tembaga (Brautigam, et al., 2014; Marysse & Geenen, 2009). Skema ini dipilih karena menjadi jalur yang mudah untuk mendapatkan pembiayaan dalam pembangunan pasca-konflik dan keterbatasan fiskal yang sedang dialami Republik Demokratik Kongo (IMF, 2006; World Bank, 2006), serta adanya pembatasan yang dilakukan oleh *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank* dalam anggaran negara (Xu, 2020). Dalam skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* ini memanfaatkan sumber daya alam mineral tanpa adanya syarat politik dan paling mudah dan cocok untuk bisa mendapatkan pembiayaan dalam pembangunan dengan secara cepat dan fleksibel, bahkan minim adanya risiko ketergantungan pada lembaga keuangan barat (Landry, 2018).

Salah satu kerja sama dalam program *Resource-for-Infrastructure (RFI)* adalah *Sicomines*. Kerja sama ini berawal dari inisiatif *CREC (Tiongkok Railway Engineering Corporation)* dan *Sinohydro*, yang telah beroperasi di Republik Demokratik Kongo sejak tahun 2001. Perusahaan-perusahaan tersebut mengusulkan perjanjian "Mineral untuk Infrastruktur" senilai USD 9 miliar untuk mendukung program pembangunan *Cinq Chantiers* yang diusulkan oleh Presiden Kabila.

Struktur kelembagaan, melibatkan *joint venture Sicomines SA*, serta kepemilikan saham ini dibagi menjadi 2 pihak yaitu antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan beberapa perusahaan konsorsium asal Tiongkok dengan dukungan yang sepenuhnya dibiayai oleh *China Exim Bank* (Landry, 2017; Landry, 2018). Berdasarkan aturan di dalamnya, Perjanjian *Sicomines* ini dirancang untuk

mengonversi pendapatan dari pemanfaatan sumber daya mineral menjadi pembangunan infrastruktur publik berskala nasional (Landry, 2017). Tujuan awal dari kerja sama *Sicomines* ini mencakup percepatan dalam pembangunan infrastruktur tanpa ada campur tangan dalam politik, sekaligus untuk mengamankan pasokan mineral strategis yang dibutuhkan bagi industri Tiongkok (Jansson, 2011a).

Namun seiring dengan berjalannya Perjanjian *Sicomines* penggunaan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* ini memunculkan banyak perdebatan. Seperti dari *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)* yang menyoroti tentang rendahnya realisasi pembangunan infrastruktur dibanding dengan komitmen awal perjanjian. Kemudian menurut dari *Global Witness* menilai skema yang digunakan dalam Perjanjian *Sicomines* ini berpotensi dapat menguntungkan para pihak investor serta dapat mengalihkan manfaat ekonomi dari Republik Demokratik Kongo (RDK). Sementara *World Bank* menekankan bahwa skema pembiayaan yang menggunakan sumber daya mineral dapat menimbulkan risiko dalam keuangan negara dalam jangka panjang jika tidak diawasi dengan mekanisme dan tata kelola yang ketat. Dan disisi lain *China African Research Initiative* dan Brautigam memandang Perjanjian *Sicomines* sebagai jalur alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur bagi negara pasca-konflik dalam menghadapi keterbatasan akses pembiayaan konvensional.

Perbedaan pendapat terhadap Perjanjian *Sicomines* tersebut tidak dapat dipahami secara mudah sebagai keberhasilan atau kegagalan pembangunan infrastruktur. Melainkan, kerja sama tersebut mencerminkan kerumitan dari penerapan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* yang melibatkan banyak interaksi antara kepentingan ekonomi, tata kelola sumber daya, serta kapasitas institusional negara penerima yaitu Republik Demokratik Kongo (RDK). Karena itu perlu ada analisis mendalam untuk mengetahui bagaimana Perjanjian *Sicomines* ini ditetapkan serta prakteknya di lapangan dan apakah ada dinamika pelaksanaan yang mempengaruhinya. Melihat dari kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis implementasi Perjanjian *Sicomines* dalam kerangka skema *Resource for-Infrastructure (RFI)* di Republik Demokratik Kongo (RDK), juga berupaya

untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai proses pelaksanaan perjanjian, dinamika aktor yang terlibat, serta juga konteks kebijakan yang membentuk jalannya kerja sama tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Perjanjian *Sicomines* yang telah disepakati antara negara Republik Demokratik (RDK) dengan Tiongkok pada awalnya ini direncanakan menggunakan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, serta memiliki tujuan untuk mengubah bagaimana sumber daya mineral bisa menjadi pembangunan infrastruktur publik. Namun pelaksanaannya ini menunjukkan ada perbedaan antara tujuan awal perjanjian dengan hasil yang sudah didapatkan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana pelaksanaan Perjanjian *Sicomines* yang menggunakan kerangka skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* di Republik Demokratik (RDK) dan apa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis tetapkan, maka berikut adalah untuk tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan Perjanjian *Sicomines* di Republik Demokratik Kongo (RDK).
2. Menemukan hambatan apa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* dalam kerja sama *Sicomines*.
3. Mengkaji bagaimana dinamika proses implementasi di lapangan yang berdampak secara langsung ke hasil pembangunan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian saya ini berharap dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis atau praktis dalam Hubungan Internasional, terutama di bidang ekonomi politik internasional dan kerja sama pembangunan internasional.

Secara Teoritis, penelitian ini berharap dapat berkontribusi untuk memperkaya tentang pelaksanaan kerja sama pembangunan yang menggunakan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, penelitian saya ini menekankan pada proses implementasi kerja sama dan dinamika. Serta memberikan pemahaman mengenai interaksi antara aktor negara maupun non negara dalam konteks penelitian saya ini adalah perusahaan milik Tiongkok, bahkan mekanisme dalam pembayaran, juga tata kelola sumber daya untuk membentuk jalannya kerjasama ekonomi internasional, khususnya pada negara berkembang pasca konflik internal.

Secara Praktis, pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam terkait pelaksanaan Perjanjian *Sicomines* sebagai salah satu model kerja sama pembangunan yang menggunakan skema pertukaran sumber daya mineral. Temuan pada penelitian juga dapat menjadi bahan refleksi bagi negara berkembang dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi skema kerja sama pembangunan mirip, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola, transparansi, dan keberlanjutan kerja sama infrastruktur berbasis *Resource-for-Infrastructure (RFI)*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian tinjauan pustaka di penelitian saya ini akan membedah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik dalam Perjanjian *Sicomines* untuk melihat dan kesamaan, perbedaan, juga kesenjangan penelitian yang akan menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Pertama, penelitian yang berjudul “*The Sicomines Agreement: Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo’s International Relations*” yang ditulis oleh Johanna Jansson pada tahun 2011, pada penelitiannya ini telah menganalisis tentang isi Perjanjian *Sicomines* sebagai bentuk perubahan juga keberlanjutan dalam penyesuaian di kebijakan luar negeri Republik Demokratik Kongo setelah mengalami konflik, dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional serta penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian yang dilakukan oleh Jansson ini menempatkan jika Perjanjian *Sicomines* dalam konteks hubungan dari ketergantungan terhadap lembaga keuangan barat menuju kemitraan strategis dengan Tiongkok yang dinilai dengan banyak syarat khususnya di politik, seperti harus mereformasi tata kelola, bahkan kebijakan ekonomi. Dalam studi ini, hal tersebut tidak dipandang sebagai bentuk kerja sama ekonomi biasa, melainkan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri strategis yang bertujuan untuk mengamankan jalur yang lebih mudah dalam menghasilkan pendapatan, mengingat keterbatasan dukungan dari lembaga keuangan internasional.

Studi ini menemukan bahwa meskipun Perjanjian *Sicomines* menawarkan fleksibilitas bagi anggaran negara dalam membiayai pembangunan nasional, strukturnya terus mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua pihak. Lebih lanjut, studi ini menyoroti kurangnya transparansi perjanjian,

dominasi aktor eksternal dalam proses pengambilan keputusan, dan taktik negosiasi pemerintah yang kurang optimal dalam mendistribusikan manfaat ekonomi dari proyek kerja sama tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerja sama hingga saat ini belum menghasilkan manfaat apa pun untuk pembangunan infrastruktur, kerja sama ini juga berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi negara penerima.

Studi ini memiliki keterbatasan, karena lebih menekankan pada aspek kebijakan luar negeri dan dinamika hubungan politik internasional dan belum secara komprehensif meneliti mekanisme implementasi pembangunan yang sebenarnya. Lebih lanjut, studi ini tidak membahas secara menyeluruh isu-isu pelaksanaan proyek, seperti keterlambatan konstruksi, masalah teknis, atau perbedaan antara target dan pembangunan infrastruktur aktual di bawah program *Sicomines*. Jadi, studi ini tidak sepenuhnya menjelaskan hubungan antara desain perjanjian dan kegagalan proyek infrastruktur di lapangan, meskipun ini adalah fokus utamanya. Maka dari itu, studi ini akan mengatasi kekurangan tersebut dengan menganalisis secara lebih rinci dinamika implementasi *Sicomines* dan faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur dari tujuan awal perjanjian (Jansson, 2011).

Kedua, penelitian berjudul “*Tiongkok’s Resource Diplomacy in Africa: Powering Development?*” ditulis oleh Marcus, Giles dan May tan (2012) Penelitian ini sudah mengkaji bagaimana penerapan skema *Resource for-Infrastructure (RFI)* sebagai bagian dari strategi diplomasi sumber daya Tiongkok di Afrika. Studi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik global dan studi kasus komparatif untuk menganalisis hubungan antara investasi Tiongkok, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur di berbagai negara Afrika. Fokus studi ini adalah bagaimana Tiongkok memanfaatkan kerja sama berbasis sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus memperkuat posisi geopolitik dan pengaruh politiknya di Afrika. Dalam konteks ini, Afrika merupakan kawasan yang sangat strategis karena cadangan mineral dan energinya yang melimpah, namun terus menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tantangan dalam mengakses pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Studi ini menemukan bahwa skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan pemberian hak penambangan penuh kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok di negara-negara mitra. Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan raya, jalur kereta api, jaringan listrik, dan berbagai fasilitas umum yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa program ini menawarkan jalur langsung untuk pembiayaan pembangunan bagi beberapa negara Afrika yang memiliki permasalahan anggaran, tingkat utang yang tinggi, dan kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank*. Di sisi lain, pendekatan Tiongkok dianggap lebih menarik karena menawarkan proses yang relatif cepat untuk pembiayaan dan implementasi proyek serta tidak tunduk pada persyaratan politik ketat yang biasanya melekat pada bantuan pembangunan dari negara-negara Barat.

Studi yang telah dilakukan ini memberikan petunjuk bahwa keberhasilan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* ini bergantung pada kapasitas kelembagaan negara penerima. Efektivitas dari kerja sama yang menggunakan skema ini bergantung kepada kemampuan sebuah pemerintah dalam mengelola kontrak, memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati. Di sisi lain, keberlanjutan program ini juga dipengaruhi oleh stabilitas harga komoditas, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan proyek. Studi ini menemukan bahwa sistem hukum yang lemah, transparansi yang rendah, dan tingkat korupsi yang tinggi dapat menghambat pelaksanaan kerja sama dan mengurangi akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Lebih lanjut, ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara negara-negara Afrika dan aktor-aktor Tiongkok berpotensi menyebabkan distribusi manfaat yang tidak merata, dengan keuntungan ekonomi lebih banyak diperoleh pihak eksternal daripada masyarakat lokal.

Studi ini hanya akan berfokus pada analisis perbandingan dan tinjauan umum implementasi dalam skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* di berbagai negara Afrika. Saat ini, implementasi proyek-proyek spesifik, termasuk proses negosiasi dan amandemen kontrak, dinamika implementasi, dan pembangunan

infrastruktur aktual di lokasi, belum diteliti secara menyeluruh. Di sisi lain, berbagai masalah yang dihadapi dalam proyek *Sicomines* di Republik Demokratik Kongo seperti keterlambatan konstruksi, perbedaan antara tujuan proyek dan hasil aktual, serta distribusi manfaat dari kemitraan belum dibahas secara detail. Maka dari itu penelitian lebih lanjut diperlukan yang secara khusus meneliti implementasi Perjanjian *Sicomines* untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi hasil skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Raw Encounters: Chinese Managers, African Workers and the Politics of Casualization in Africa’s Chinese Enclaves*” yang ditulis oleh Ching Kwan Lee (2009). Studi ini akan mengulas tentang dinamika hubungan yang terbentuk akibat kehadiran Tiongkok di Republik Demokratik Kongo, terkhususnya terkait standar ketenagakerjaan. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi lapangan dan observasi langsung di lokasi, studi ini meneliti interaksi antara manajemen perusahaan-perusahaan Tiongkok dan tenaga kerja pertambangan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi Tiongkok tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, pola ketenagakerjaan, dan hubungan kekuasaan di masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Penelitian Ching Kwan Lee telah mengungkap ketidaksetaraan dalam hubungan kerja antara manajemen Tiongkok dan pekerja lokal di Afrika, terutama terkait proses pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, pengawasan di tempat kerja, dan penegakan hak-hak karyawan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok cenderung menerapkan sistem manajemen terpusat dimana pekerja Tiongkok mendominasi posisi strategis, sehingga membatasi peluang pekerja lokal untuk pelatihan, pengembangan keterampilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, perbedaan budaya kerja antara manajemen Tiongkok dan pekerja lokal seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja, yang mempengaruhi efektivitas operasi bisnis.

Meskipun studi ini memberikan wawasan tentang berbagai tantangan sosial dan kelembagaan investasi Tiongkok di Afrika, studi ini terutama berfokus pada

hubungan kerja dan dinamika pasar tenaga kerja di sektor pertambangan. Dampak faktor-faktor ini terhadap implementasi skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, khususnya dalam konteks Perjanjian *Sicomines*, belum diteliti. Di sisi lain, banyak masalah tentang implementasi di dalam proyek pembangunan infrastruktur, yaitu adanya keterlambatan, tujuan awal perjanjian dan hasil tidak sama, dan efektivitas hasil pembangunan belum diteliti.

Maka dari itu, hubungan antara dinamika pasar tenaga kerja dan keberhasilan implementasi proyek infrastruktur memerlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini memiliki sudut pandang baru dalam memahami bagaimana dinamika non ekonomi bisa mengintervensi proses implementasi Perjanjian *Sicomines*. Temuan Lee menunjukkan bahwa tantangan sosial, perbedaan budaya kerja, hubungan kerja, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal dapat melemahkan efektivitas kerja sama antara Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo. Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perjanjian *Sicomines* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketentuan kontrak, namun juga oleh dinamika sosial dan hubungan perburuhan di tingkat operasional (Lee, 2009).

Keempat, penelitian dengan judul “*Tiongkok in Africa: Parter, Competitor or Hegemon?*” Yang ditulis oleh Chris Alden (2007) Penelitian ini telah mengkaji tentang bagaimana posisi Tiongkok di Afrika melalui perspektif geopolitik dan ekonomi politik global. Studi yang sudah dilakukan ini memberikan petunjuk bahwa ada keterlibatan Tiongkok dengan Afrika, ini tidak hanya dorongan dari kepentingan sebuah negara untuk ekonominya, tapi ini ada kepentingan dalam mengamankan sumber daya mineral, serta untuk mempeluas pengaruhnya. Hubungan ekonomi yang semakin berkembang dengan Tiongkok dapat berpotensi pengaruhi dinamika kekuasaan dan hubungan politik.

Menghadapi kendala pendanaan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur, banyak negara Afrika telah mulai membangun kerja sama ekonomi dengan Tiongkok melalui skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*. Dalam skema ini negara penerima dapat pembangunan infrastruktur tapi harus bersedia untuk memberikan sumber daya alamnya kepada perusahaan Tiongkok. Skema ini tergolong mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan dalam pembangunan

dibanding melalui lembaga keuangan internasional. Di sisi lain, kerja sama yang ditawarkan oleh Tiongkok tidak selalu terikat pada kondisi politik dan tidak memerlukan perubahan wajib dalam sistem keuangan nasional. Tapi ini dapat mendorong negara untuk memberikan hak istimewa kepada perusahaan Tiongkok, karena mereka melihat ini adalah cara mudah untuk bisa mengamankan proyek pembangunan di negaranya.

Meski kerja sama antara negara Afrika dan Tiongkok memberikan manfaat secara ekonomi, tapi ini bisa membuat negara bergantung kepada pendanaan dari pihak asing. Kondisi ini dipengaruhi dari perbedaan kapasitas ekonomi dan teknologi, bahkan proses negosiasi dari kedua belah pihak. Akibatnya, aktor dari pihak Tiongkok lebih mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak mitra seperti Afrika kurang mendapatkan apa yang seharusnya mereka inginkan. Bahkan ini bisa membuat posisi Tiongkok semakin kuat dalam hubungan kerja sama.

Alden memberikan penjelasan adanya Tiongkok di Afrika ini tidak hanya merupakan kepentingan untuk ekonomi, tapi juga ada kepentingan secara politik dan kepentingan untuk memperluas pengaruhnya. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat posisi politik dan strategis Tiongkok di kawasan tersebut.

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis konseptual, dan dinamika geopolitik hubungan Tiongkok dengan Afrika, tapi tidak menjelaskan implementasi secara langsung ke proyek pembangunan. Studi ini tidak sepenuhnya meneliti mekanisme pendanaan, proses negosiasi, dan amandemen perjanjian, maupun berbagai hambatan terhadap implementasi *Resource-for-Infrastructure (RFI)*. Studi ini juga tidak meneliti perbedaan antara tujuan pembangunan infrastruktur dan hasil aktual dalam proyek-proyek tertentu termasuk Perjanjian *Sicomines* di Republik Demokratik Kongo. Dari hal yang sudah dijelaskan, penelitian ini tidak menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan ini bisa terwujud dalam hubungan kerja sama pembangunan

Meskipun penelitian Alden memberikan wawasan tentang hubungan yang tidak seimbang antara Tiongkok dan negara-negara Afrika, analisis yang lebih rinci tentang implementasi skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* masih diperlukan. Penelitian ini memiliki celah untuk memberikan penjelasan tentang implementasi Perjanjian *Sicomines* di Republik Demokratik Kongo. Studi ini berfokus pada mekanisme pendanaan, perubahan dalam ketentuan perjanjian, dan pembangunan infrastruktur yang dihasilkan. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan mempengaruhi implementasi kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Kongo.

Kelima. Penelitian ini berjudul “*Winner Take All: Tiongkok’s Race for Resources and What It Means for Africa*” Studi yang dilakukan oleh Dambisa Moyo ini meneliti strategi Tiongkok untuk mengakses sumber daya alam Afrika melalui investasi, pembiayaan infrastruktur, dan pinjaman berbasis komoditas. Dari perspektif politik dan ekonomi global, dan berdasarkan analisis data sekunder, studi ini menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan Tiongkok akan energi, mineral, dan bahan baku industri merupakan pendorong utama ekspansi ekonominya di negara-negara Afrika yang kaya sumber daya. Afrika sering sekali dianggap sebagai daerah yang sangat strategis bukan hanya untuk mendukung perekonomian Tiongkok saja, tapi bisa memperluas pengaruhnya di ekonomi dan politik internasional.

Pendekatan yang dilakukan Tiongkok terhadap hubungan kerja sama pembangunan di Afrika ini memiliki perbedaan dari segi model yang sering dipakai banyak negara barat dan lembaga keuangan internasional. Kerja sama ini fokusnya pada pembangunan infrastruktur dengan dukungan skema pembiayaan dan pertukaran sumber daya alam mineral. Bantuan dan pinjaman yang sudah diberikan oleh Tiongkok ini tidak memiliki syarat politik bahkan tidak wajib untuk merubah tata kelola. Hal tersebut membuat kerja sama ini sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mudah bagi negara di Afrika di tengah menghadapi keterbatasan pendanaan. Dengan mengikuti kerja sama ini, proyek infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, jaringan kelistrikan bisa dibangun secara mudah dan bisa mendukung perekonomian negara yang menjalin kerja sama ini.

Tapi menurut Moyo beranggapan, ada beberapa risiko yang bisa timbul dari kerja sama ini. Penelitian ini memberikan jawaban bahwa kolaborasi dalam kerja sama ini sering ditandai adanya kurang transparansi dalam proses perumusan perjanjian dan kurang mekanisme dalam pengawasannya secara publik. Keberlangsungan kerja sama ini juga dapat dipengaruhi oleh tidak menentunya harga komoditas di pasar global, ini dapat mempengaruhi pendapatan negara karena mineral merupakan sumber utama negara. Situasi ini berpotensi meningkatkan beban utang jika pendapatan dari sektor komoditas tidak cukup untuk menutupi pembayaran pinjaman dan biaya pembangunan infrastruktur. Jika diteruskan seperti ini bisa membuat negara Afrika menjadi lebih bergantung pada ekspor komoditas dan sumber pemasukan negara secara eksternal.

Pada penelitian Moyo, bahwa banyak negara Afrika sedang menghadapi keterbatasan dalam kapasitas kelembagaannya, bahkan kurang terampil dalam melakukan negosiasi ketika melakukan kerja sama dengan Tiongkok. Di sisi lain, ada permintaan tinggi terhadap investasi dan pembiayaan pembangunan yang membuat negara menerima banyak bentuk kerja sama yang ditawarkan oleh Tiongkok. Ini membawa risiko ketidakadilan dalam pembagian manfaat ekonomi bagi penduduk lokal. Moyo menekankan kerja sama ini bisa menciptakan ketergantungan ekonomi jika tidak dikelola secara baik di segi tata kelola, pengawasan dalam kerja sama, dan harus memiliki keterampilan dalam negosiasi

Namun, penelitian Moyo lebih berfokus pada analisis umum hubungan Tiongkok-Afrika dan belum meneliti secara detail implementasi proyek infrastruktur spesifik *Resource-for-Infrastructure (RFI)*. Studi ini tidak meneliti proses negosiasi dan amandemen perjanjian, mekanisme pendanaan, kendala implementasi proyek, atau kesenjangan antara tujuan pembangunan infrastruktur dan hasil aktual. Maka dari itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Perjanjian *Sicomines* di Republik Demokratik Kongo diperlukan untuk menentukan sejauh mana berbagai risiko yang diidentifikasi oleh Moyo tercermin dalam implementasi kerja sama *Resource-for-Infrastructure (RFI)*,

2.2 Landasan Teoritis dan Konseptual

2.2.1 Teori Interdependensi Asimetris

Teori interdependensi asimetris yang telah dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye adalah teori utama dalam materi hubungan internasional yang menyoroti bahwa hubungan antar negara ini tidak selalu berjalan secara seimbang. Negara tidak pernah memiliki posisi yang kuat di bidang ekonomi teknologi, dan kekuatan militer. Sebagai contoh nyata, negara maju seperti Amerika Serikat atau negara di Eropa mempunyai kapasitas ekonomi dan teknologi yang jauh dibandingkan negara berkembang, sehingga mereka mampu mengendalikan berbagai aspek kerja sama internasional, mulai dari mekanisme pendanaan, pengaturan kebijakan, penguasaan teknologi tinggi, hingga distribusi manfaat ekonomi yang diperoleh (Keohane & Nye, 1977)

Lebih jauh lagi, contoh kekuasaan yang nyata terlihat dalam hubungan perdagangan dan investasi, negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar sering menetapkan syarat tertentu dalam perjanjian internasional yang menguntungkan bagi mereka, sekaligus membatasi negara mitra agar tetap berada dalam posisi yang bergantung pada negara maju. Banyak negara besar yang mengendalikan teknologi canggih, misalnya, memberlakukan hak paten dan hak kekayaan intelektual, sehingga negara lain bergantung pada lisensi dan teknologi mereka. Ini membuat negara yang tidak memiliki posisi yang kuat merasa tidak adil dan memperburuk hubungan antar negara. Tapi untuk negara yang memiliki posisi yang kuat secara ekonomi, teknologi cenderung tidak bergantung pada pihak lain ini membuat negara yang lemah lebih rentan mendapatkan tekanan dan pengaruh dari negara kuat.

Negara yang mempunyai kapasitas tata kelola yang besar bisa lebih mudah untuk mengeksploitasi ketergantungan negara lain dalam kepentingan strategis mereka. Contohnya yaitu, negara yang memiliki industri yang berkembang pesat sering menggunakan teknologi, dan sumber daya manusianya untuk memperkuat pengaruhnya dalam proses negosiasi kerja sama. Ini membuat pembagian manfaat sering tidak merata. Negara yang bergantung pada pihak asing tidak menerima

bagian secara adil dan lebih rentan terkena perubahan kebijakan jika dipaksakan terus melakukan hubungan kerja sama dengan negara yang kuat.

Contoh konkret lain dari dinamika ini dapat ditemukan dalam hubungan antara negara berkembang dan investor asing, terutama dalam konteks proyek infrastruktur besar seperti Perjanjian *Sicomines* antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok. Tiongkok sebagai kekuatan finansial dan mitra teknologi inovatif dapat mengendalikan pengelolaan proyek, menentukan mekanisme pembiayaan, dan mengawasi distribusi manfaat ekonomi. Republik Demokratik Kongo ini sering bergantung dengan pihak asing terkait investasi, dan sumber daya yang diberikan oleh Tiongkok, seperti di bidang pertambangan, dan pengembangan infrastruktur di wilayah pertambangan. Hal ini melemahkan posisi tawar-menawarnya, dan manfaat dari kerja sama ini didistribusikan secara tidak merata.

Di sisi lain, Fenomena ini tidak terbatas pada hubungan bilateral tetapi juga mencerminkan lingkup pengaruh yang semakin besar dalam sistem internasional, di mana negara-negara memiliki kekuatan untuk mendominasi dan membentuk proses pengambilan keputusan yang menentukan arah kerja sama internasional sesuai dengan preferensi dan kepentingan nasional mereka. Negara-negara yang mengendalikan sumber daya strategis, mineral langka, atau teknologi canggih cenderung menggunakan posisi strategis mereka untuk memperkuat dominasi mereka di sektor pertambangan, yang pada akhirnya memperdalam ketidaksetaraan global. Dalam konteks ini, teori saling ketergantungan asimetris sangat relevan untuk memahami seberapa sering hubungan yang saling menguntungkan ada yang menutupi saling ketergantungan dan ketidakseimbangan kekuasaan yang memiliki dampak besar pada dinamika politik dan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional.

2.2.2 Konsep Kerja Sama Ekonomi Internasional

Dalam konteks kerja sama ekonomi internasional, ini merujuk pada bentuk hubungan antar negara yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, dan pembiayaan lintas batas. Dengan melakukan kerja sama ini,

negara berusaha untuk memanfaatkan potensi diri mereka masing-masing untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memperkuat posisi mereka di internasional. Kerja sama ekonomi tidak bisa dipahami hanya alat transaksi ekonomi tapi ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat pengaruh secara ekonomi serta melindungi kepentingan strategisnya secara internasional. Negara berkembang banyak terlibat dalam kerja sama ekonomi dengan negara maju untuk bisa mengakses ke teknologi, modal serta pasar yang lebih luas, sehingga dapat membuat perekonomian negara berkembang.

Gilpin (2011) kerja sama ekonomi internasional berlangsung dalam sistem politik dan ekonomi internasional dengan pada dasarnya ini harus adil dan merata. Negara-negara dengan ekonomi yang kuat, teknologi maju, dan lembaga negara yang berfungsi dengan baik dapat menduduki posisi dominan dalam menentukan arah, kebijakan, dan bentuk kerja sama. Negara-negara berkembang banyak menghadapi kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam mereka dikarenakan mereka lebih bergantung pada pihak asing terkait bantuan eksternal dan negara berkembang ini masih belum mampu untuk melakukan negosiasi perjanjian yang dapat menguntungkan pihak mereka (Gilpin, 2011).

Bagi negara berkembang, kerja sama ekonomi internasional ini lebih memfokuskan pada proyek dengan skala besar seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya. Ini memiliki tujuan yaitu untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Hambatan seperti tata kelola, lemah dalam kapasitas institusional dapat mengganggu efektivitas dan keberlanjutan kerja sama ini. Ini .

Studi ini menggunakan konsep kerja sama ekonomi internasional untuk menganalisis hubungan antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok di bawah Perjanjian *Sicomines*, yang menggunakan mekanisme *Resource-for Infrastructure (RFI)*. Dengan melakukan perjanjian ini, negara berkembang berusaha untuk bisa mendapatkan manfaat ekonominya serta mendorong pembangunan nasional. Tapi kerja sama ini menimbulkan banyak tantangan dan risiko. Jadi penelitian ini akan menjelaskan gambaran yang lebih luas tentang dinamika dan kompleksitas kerja sama ekonomi internasional.

2.2.3 Konsep Implementasi Perjanjian Internasional

Dalam konsep implementasi perjanjian internasional ini, proses di mana pelaksanaan kerja sama atau perjanjian sudah disepakati dan sudah ditandatangani secara bersama ke dalam praktik di lapangan. Ini bukan sekadar tentang adopsi suatu perjanjian, tetapi lebih tentang bagaimana ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut diimplementasikan melalui kebijakan, program, dan tindakan konkret negara-negara peserta (Simmons, 1998). Proses ini mencakup fase-fase yang kompleks, mulai dari penerjemahan norma-norma internasional ke dalam peraturan nasional dan penyesuaian kelembagaan di dalam suatu negara hingga mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat. Maka dari itu, implementasi tidak dapat dipahami hanya sebagai tugas administratif teknis semata; melainkan, ini adalah proses politik yang melibatkan negosiasi kepentingan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional.

Menurut Simmons (1998), implementasi adalah proses kritis untuk keberhasilan perjanjian internasional, karena mencerminkan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kewajibannya. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas kelembagaan, kondisi politik domestik, efektivitas tata kelola, mekanisme kontrol, dan koordinasi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama. Dalam konteks ini, kapasitas kelembagaan mengacu pada kemampuan aparatur negara untuk mengembangkan mekanisme implementasi yang efektif, menggunakan anggaran secara efektif, dan memastikan bahwa setiap unit yang bertanggung jawab memiliki sumber daya manusia dan teknis yang memadai. Pada saat yang sama, kondisi politik domestik menentukan sejauh mana pemerintah dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban internasionalnya dalam menghadapi tekanan dari kelompok kepentingan, oposisi politik, dan dinamika siklus pemilihan. Jika tidak ada dukungan terkait politik yang stabil, pelaksanaan perjanjian internasional ini rentang dengan stagnasi atau bisa mengalami kemunduran dan berhenti total (Simmons, 1998).

Selain itu, Risse et al. (2013) menjelaskan bahwa implementasi keterlibatan tidak selalu konsisten dengan niat awal komunitas internasional terorganisir. Dalam

proses implementasi sering muncul perbedaan antara *policy design* dan *policy implementation*, yaitu ketidaksesuaian antara desain kebijakan dalam perjanjian dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Tersebut bisa dipengaruhi oleh kapasitas negara lemah, ada perubahan dalam ekonomi dan politik, bahkan bisa memunculkan hambatan dalam proses pelaksanaan kerja sama. Risse et al. (2013) lebih lanjut menekankan bahwa celah antara desain dan implementasi ini seringkali bersumber dari asimetri informasi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan para pelaksana di tingkat lapangan. Di sisi lain, perubahan kondisi eksternal yang tidak dapat diantisipasi pada saat perjanjian disusun, seperti gejolak harga komoditas global, krisis keuangan, atau pergeseran prioritas politik rezim yang berkuasa, turut menjadi faktor yang memperparah kesenjangan tersebut. Dalam konteks ini, fleksibilitas mekanisme implementasi menjadi kunci agar perjanjian tetap relevan dan dapat dijalankan secara efektif meskipun kondisi lapangan berubah secara signifikan dari asumsi awal yang digunakan dalam proses perundingan (Risse et.al, 2013).

Implementasi juga tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal terhadap isi perjanjian, tetapi juga menyangkut efektivitas pencapaian tujuan yang telah disepakati. Perbedaan ini penting karena suatu negara dapat secara formal memenuhi kewajiban prosedural yang ditetapkan dalam suatu perjanjian misalnya, dengan membentuk badan pelaksana atau mengeluarkan ketentuan tambahan tanpa mencapai dampak substantif yang diharapkan dari kerja sama ini. Hal ini sejalan dengan perspektif Chayes (1993), yang membedakan antara “kepatuhan” ketaatan pada ketentuan formal dan “efektivitas” kemampuan perjanjian untuk mengubah perilaku aktor sesuai dengan tujuan yang disepakati. Keberhasilan implementasi perjanjian internasional dapat diukur sejauh mana kerja sama ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan bukan semata-mata dengan pemenuhan kewajiban prosedural administratif (Chayes, 1993).

Studi ini menggunakan konsep implementasi perjanjian internasional untuk memahami bagaimana ketentuan Perjanjian *Sicomines* diimplementasikan dalam kerja sama praktis antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok. Konsep ini membantu menjelaskan berbagai dinamika implementasi, hambatan terhadap

pembangunan infrastruktur, dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara tujuan kerja sama dan implementasi aktualnya di lapangan. Melalui perspektif konseptual ini, analisis tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal perjanjian, tetapi juga pada dimensi politik, ekonomi, dan kelembagaan yang secara signifikan membentuk jalannya implementasi kerja sama. Dengan demikian, konsep implementasi perjanjian internasional berfungsi sebagai kerangka analitis yang relevan dan komprehensif untuk menilai sejauh mana Perjanjian *Sicomines* telah berhasil diterjemahkan ke dalam pembangunan infrastruktur konkret dan telah memberikan manfaat bagi penduduk Kongo, sebagaimana yang ada di dalam perjanjian asli antara kedua negara.

2.2.4 Konsep Skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*

Model sumber daya untuk infrastruktur (*Resource-for-Infrastructure/RFI*) adalah bentuk kerja sama pembangunan yang menghubungkan akses terhadap sumber daya alam dengan pembangunan infrastruktur oleh negara atau aktor lain. Dalam model ini, pembangunan infrastruktur dibiayai oleh pendapatan dari ekstraksi bahan baku negara penerima (Corkin, 2013). Pada dasarnya, ini adalah sistem pertukaran antara sumber daya alam yang melimpah di negara berkembang dan kemampuan teknologi, modal, serta kapasitas konstruksi negara mitra. Secara teoritis, tidak diperlukan transfer keuangan langsung pada fase awal kerja sama, dan hal ini menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Corkin (2013), skema *Resources for Infrastructure (RFI)* diciptakan sebagai opsi pembiayaan pembangunan alternatif bagi negara-negara berkembang yang memiliki akses terbatas terhadap pinjaman internasional konvensional. Melalui skema ini, negara penerima manfaat dapat mengamankan pembangunan infrastruktur tanpa harus melakukan pembayaran langsung pada tahap awal, sementara negara mitra menerima jaminan akses jangka panjang terhadap sumber daya alam. Munculnya skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* juga tidak terlepas dari meningkatnya permintaan global terhadap komoditas mineral dan energi, yang mendorong negara-negara dengan kebutuhan bahan baku tinggi untuk mencari mengamankan pasokan mineral dalam jangka panjang melalui perjanjian bilateral yang mengikat. Dalam kondisi demikian, skema ini

menawarkan solusi yang dinilai saling menguntungkan, di mana negara berkembang mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, sementara negara mitra memperoleh kepastian akses terhadap sumber daya strategis yang tidak dapat dipenuhi dari pasar bebas semata (Corkin, 2013).

Dalam praktiknya, skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* banyak diterapkan dalam kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya mineral melimpah. Proyek ini biasanya membutuhkan pengeluaran di bidang seperti, pembangunan jalan, rumah sakit, bendungan, dan infrastruktur publik lainnya, proyek berbasis mekanisme pertukaran. Implementasi program *Resource-for-Infrastructure (RFI)* oleh Tiongkok di berbagai negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara mencerminkan strategi internasional yang berbeda dari pendekatan lembaga keuangan multilateral tradisional seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund (IMF)*. Lembaga ini pada umumnya itu memberikan syarat untuk harus mereformasikan sistem politiknya dan memberikan perilaku yang khusus untuk pencairan dana. Meskipun kondisi tersebut membuat program yang ditawarkan oleh Tiongkok relatif lebih dapat diterima oleh negara-negara berkembang, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang kejelasan kerja sama, transparansi, dan potensi ketergantungan jangka panjang.

Namun, Brautigam (2009) menjelaskan bahwa *Resource-for-Infrastructure (RFI)* membawa berbagai risiko selama implementasi, terutama jika negara penerima memiliki kapasitas kelembagaan yang lemah, bergantung pada harga komoditas global, mengalami transparansi kontrak yang rendah, pengawasan yang tidak memadai, dan tunduk pada dominasi eksternal yang semuanya dapat mengganggu efektivitas pembangunan infrastruktur dalam kerja sama ini. Brautigam (2009) juga menekankan bahwa struktur kontraktual dalam model ini seringkali tidak seimbang, dengan investor asing memegang posisi tawar yang jauh lebih kuat daripada pemerintah negara penerima. Ketidakseimbangan ini terlihat dalam perjanjian teknis yang kompleks, mekanisme penyelesaian sengketa yang rentan terhadap kebangkrutan, dan kerahasiaan yang membatasi akses publik terhadap detail kontrak. Kondisi tersebut semakin melemahkan posisi negara tuan

rumah dalam memastikan bahwa implementasi kerja sama selaras dengan kepentingan nasional negara dan kebutuhan pembangunan jangka panjang (Brautigam, 2009).

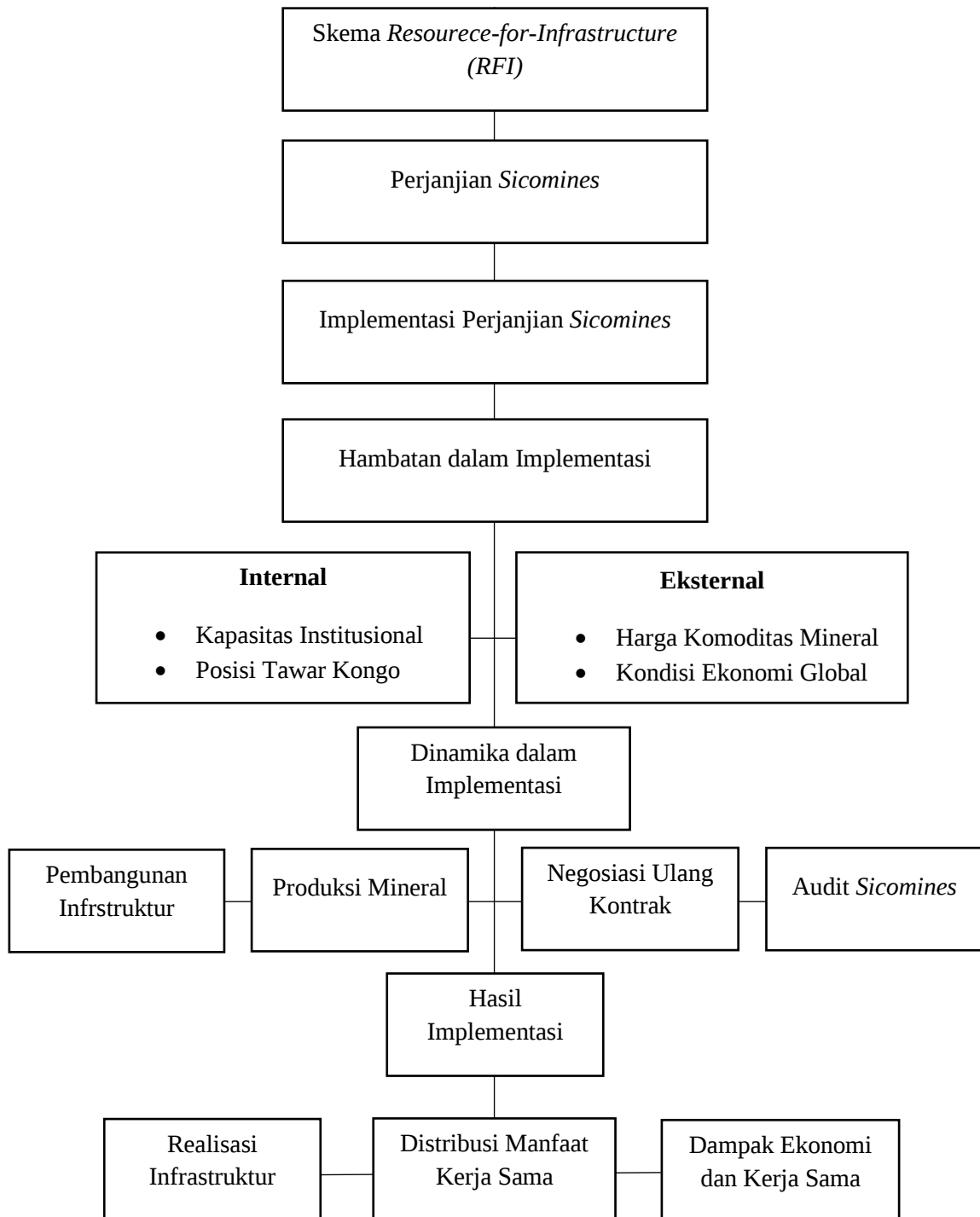
Mohan dan Lampert (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pembangunan, karena pembiayaan proyek sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar komoditas global. Dan apabila dari harga komoditas ini mengalami penurunan dan produksi pertambangan tidak bisa memenuhi target, pembangunan infrastruktur ini bisa saja mengalami penundaan. Bahwa risiko pasar komoditas bisa selalu mempengaruhi pembangunan infrastruktur dalam skema ini. Ketidakpastian eksternal di luar kendali pemerintah dapat secara langsung membahayakan ketersediaan layanan publik dan konektivitas yang dijanjikan. Untuk lebih lanjut Mohan dan Lampert juga menyoroti bahwanya dominasi dari tenaga kerja dan perusahaan asing dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dalam skema ini dapat membatasi transfer teknologi dan penguatan kapasitas lokal, yang membuat manfaat pembangunan yang diperoleh negara penerima manfaat tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan tidak dapat mendukung akan kemandirian ekonomi dari negara penerima secara berkelanjutan (Mohan & Lampert, 2013).

Dalam penelitian ini menggunakan konsep *Resource-for-Infrastructure (RFI)* untuk memahami mekanisme kerja sama dalam Perjanjian *Sicomines* yang menghubungkan pemanfaatan sumber daya mineral dengan pembangunan infrastruktur di Republik Demokratik Kongo. Konsep ini membantu menjelaskan pola kerja sama, mekanisme pembiayaan proyek, hubungan antara sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur, serta berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi Perjanjian *Sicomines*. Dengan menggunakan kerangka konsep *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, analisis dalam penelitian ini dapat secara lebih spesifik untuk mengidentifikasi sejauh mana struktur perjanjian telah menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan dan dapat menghambat terwujudnya tujuan

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan konseptual yang telah diuraikan, penelitian ini memandang bahwa implementasi dari Perjanjian *Sicomines* sendiri merupakan hasil dari interaksi dari banyaknya faktor yang membentuk dinamika pelaksanaannya. Oleh sebab itu untuk mempermudah terhadap pemahaman alur hubungan antar variabel tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan untuk membentuk visual yang menggambarkan hubungan faktor yang mempengaruhi bagaimana proses Perjanjian *Sicomines* hingga menghasilkan output tertentu.

Berikut ini adalah visual dari Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian (diolah oleh peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang di mana penelitian ini paling banyak digunakan untuk meneliti sebab akibat dengan menekankan pada makna, proses, bahkan konteks yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Berbeda dengan kuantitatif, yang fokusnya itu pada pengukuran dan pengujian hubungan antar variabel memakai data angka. Penelitian ini hanya memahami hubungan sosial melalui penafsiran data secara deskriptif.

Creswell menjelaskan pada tahun 2014 bahwa pendekatan kualitatif berfungsi untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok pada isu-isu sosial atau kemanusiaan. Pendekatan yang saya gunakan ini untuk memahami tentang fenomena dengan memanfaatkan banyak sumber data tertulis

Menurut Danzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif adalah metode yang, dalam konteks spesifiknya, menjadikan peneliti sebagai alat utama untuk memahami fenomena sosial. Metode ini sangat cocok untuk studi hubungan internasional dan kebijakan publik karena dapat menggambarkan hubungan kekuasaan, motivasi aktor, pergerakan kelembagaan, dan fase implementasi kebijakan yang seringkali tidak tercakup oleh data statistik. Penelitian saya menggunakan metode kualitatif dalam hubungan internasional untuk mengetahui praktis perjanjian dan faktor yang bisa membuat berhasil atau gagal sebuah perjanjian.

Penelitian ini akan memakai metode dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif dipakai untuk memaparkan secara terstruktur tahap pelaksanaan Perjanjian *Sicomines* Dari kesepakatan tahun 2008 hingga situasi saat ini, studi ini menggambarkan berbagai

perkembangan dalam kerja sama antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok. Ini termasuk kemajuan di sektor pertambangan, pengembangan infrastruktur, perubahan pada kesepakatan, dan berbagai hambatan yang dihadapi selama implementasi. Adanya hubungan antara perkembangan dan hasil yang sudah dicapai tidak hanya menggambarkan fakta tapi menjelaskan hambatan dan akibat yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan keterbatasan dalam Perjanjian *Sicomines*.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dikarenakan cocok dengan pertanyaan penelitian tentang implementasi perjanjian internasional. Implementasi perjanjian internasional, proses yang panjang melibatkan banyak pihak, kepentingan yang berbeda, dan kondisi politik dari semua negara juga saling terikat. Pemahaman tentang implementasi perjanjian internasional sangat penting. Perjanjian *Sicomines* tidak cukup hanya dengan perhitungan kuantitatif, namun butuh analisis mendalam terhadap dokumen perjanjian, catatan audit, laporan dari organisasi internasional, tulisan ilmiah, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan jalannya kerja sama itu.

Di sisi lain, penggunaan metode kualitatif juga cocok karena penelitian ini bertujuan menguji penerapan Perjanjian *Sicomines* menggunakan kerangka teoritis teori interdependensi asimetris, konsep kerja sama ekonomi global, konsep implementasi perjanjian internasional, dan *Resource-for-Infrastructure (RFI)*. Keempat perspektif ini memberikan bahwa penting untuk bisa memahami hubungan antara pihak terkait, dalam distribusi kekuasaan, fungsi kerja sama bahkan tahapan dalam implementasi perjanjian. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menyelidiki bagaimana ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok mempengaruhi implementasi kerja sama, bagaimana konsep *Resource-for-Infrastructure (RFI)* dalam praktiknya dan bagaimana hambatan bisa mempengaruhi hasil kerja sama.

Melalui pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Perjanjian *Sicomines* dalam kerangka *Resource-for-Infrastructure (RFI)*. Penelitian saya ini juga akan membahas

hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi proses implementasi dan menjelaskan hubungan kerja sama dengan dinamika implementasi bahkan hasil yang telah dicapai. Penggunaan metode penelitian kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kerja sama diimplementasikan di *Sicomines*, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Republik Demokratik Kongo.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian saya terletak pada penentuan ruang lingkup investigasi untuk memastikan proses penelitian yang lancar dan akurat sesuai dengan pedoman sistematis. Penelitian saya memainkan peran penting dalam membantu para peneliti mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dianalisis tanpa harus mencakup seluruh fenomena yang mereka cari. Berkat fokus penelitian yang jelas ini, penelitian dapat berkonsentrasi pada pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan hasil yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa tujuan penelitian tidak terlampaui.

Miles, Huberman dan Saldana pada tahun 2014, menyatakan jika penelitian dengan kualitatif ini memiliki Batasan dalam lingkupnya. Fokus penelitian ini bahkan tidak menetapkan akan nilai statistik pada metode kuantitatif, akan tetapi, ini ditentukan berdasarkan fenomena, tahapan, hubungan dan latar belakang yang ingin dipahami, ini mendukung untuk mengenali unsur yang penting berkaitan isu penelitian sekaligus meringankan proses dan analisis data. Penelitian saya ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan Perjanjian *Sicomines* dalam kerangka skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Republik Rakyat Tiongkok. untuk fokus utama dari metode kualitatif ini lebih diarahkan pada bagaimana perjanjian itu bisa dilaksanakan sejak ditandatangani tahun 2008 sampai perkembangannya pada periode saat ini.

Penelitian ini tidak hanya melihat isi perjanjian secara garis besar tetapi juga akan menganalisis bagaimana ketentuan yang telah disepakati dan diterapkan dalam

praktik serta bagaimana dinamika yang muncul selama pelaksanaan kerja sama bisa mempengaruhi hasil implementasi yang dicapai.

Dalam kajian ini, pelaksanaan Perjanjian *Sicomines* dipahami sebagai cara menjalankan kerja sama yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya alam mineral dengan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme skema *Resource for-Infrastructure (RFI)*. Maka dari itu fokus penelitian ini akan diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu realisasi kegiatan pertambangan sebagai sumber pembiayaan proyek, realisasi pembangunan infrastruktur yang di mana itu sudah disepakati dalam perjanjian, mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, serta perubahan dan renegotiasi kontrak yang terjadi selama implementasi berlangsung. Untuk bagian itu sering dipandang penting, dapat mencerminkan sejauh mana tujuan awal perjanjian ini bisa diwujudkan dalam pelaksanaannya.

Berbagai hambatan yang mempengaruhi implementasi Perjanjian *Sicomines*, lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah, buruknya dalam mengelola proyek, kurang akan adanya pengawasan proyek di lapangan, bahkan ada indikasi kontrak yang tidak transparan. Penelitian ini menganalisis faktor eksternal yang muncul dari situasi global, seperti fluktuasi harga mineral global, perubahan lanskap ekonomi global, tekanan dari lembaga keuangan internasional, dan hubungan perdagangan antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok. Semua faktor ini telah memengaruhi kelancaran implementasi perjanjian tersebut.

Penelitian ini akan memusatkan pada observasi hubungan antara dinamika implementasi dan hasil yang sudah dicapai secara bersama sama. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana perubahan harga mineral, penundaan proyek, temuan audit, pembagian keuntungan yang tidak merata, dan perubahan ketentuan kontrak mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur berdasarkan Perjanjian *Sicomines*. Pada kesempatan lain ini hanya akan menjelaskan implementasi perjanjian tapi akan memperdalam bagaimana hubungan antara desain kerja sama, proses dan hasil.

Studi ini, melalui fokus penelitiannya, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Perjanjian *Sicomines* sebagai salah satu bentuk kerja sama ekonomi internasional berbasis *Resource-for Infrastructure (RFI)*. Lebih lanjut, studi ini berupaya menjelaskan bagaimana interaksi faktor internal dan eksternal membentuk dinamika implementasi dan mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur di Republik Demokratik Kongo. Dengan demikian, studi ini menawarkan tinjauan komprehensif tentang hubungan antara desain kerja sama menggunakan mekanisme *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, proses implementasi, dan hasil pembangunan dari kerja sama *Sicomines*.

3.3 Jenis Sumber Data

Sumber dalam penelitian kualitatif menjadi dasar dari pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, karena hal ini dicapai melalui interpretasi dan analisis isi dokumen. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode yang efektif dalam penelitian kualitatif, khususnya untuk meneliti kebijakan publik, perjanjian internasional, dan laporan kelembagaan yang mendokumentasikan proses, dinamika, dan perkembangan fenomena sosial dan politik. Peneliti akan mendapatkan beberapa informasi secara faktual, dan historis dengan menggunakan dokumen sehingga akan dapat mudah menjelaskan hubungan antara kebijakan, aktor, dan hasil implementasi

Penggunaan data sekunder dipilih karena objek penelitian berupa implementasi Perjanjian *Sicomines* dalam kerangka *Resource-for-Infrastructure (RFI)* Fenomena ini didokumentasikan secara luas dalam berbagai laporan resmi, dokumen perjanjian, publikasi ilmiah, dan laporan dari lembaga internasional. Ini akan berfokus pada analisis implementasi perjanjian internasional, sebagian besar informasi yang diperlukan tersedia dalam bentuk dokumen dan dapat dilacak serta diverifikasi.

Data sekunder untuk studi ini diambil dari berbagai sumber yang sangat kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi dokumen resmi Perjanjian *Sicomines* laporan implementasinya, laporan evaluasi

yang diterbitkan oleh lembaga internasional seperti *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*, *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, dan *AidData*, serta berbagai publikasi akademik berupa, jurnal ilmiah, artikel penelitian yang membahas kerja sama Tiongkok-Afrika, ekonomi politik internasional, implementasi perjanjian internasional, dan skema *Resource-for Infrastructure (RFI)*.

Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan laporan kebijakan dan kajian institusional dari berbagai lembaga penelitian, serta lembaga riset lainnya yang memiliki fokus pada isu pembangunan infrastruktur, tata kelola sumber daya alam, dan hubungan ekonomi internasional. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini turut memanfaatkan pemberitaan media internasional yang kredibel seperti *Reuters*, *Bloomberg*, *Quartz Africa*, dan media lainnya yang memuat informasi mengenai perkembangan implementasi *Sicomines*, proses renegotiasi kontrak, audit proyek, serta berbagai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan kerja sama.

Sumber data ini akan mengetahui tentang gambaran menyeluruh mengenai implementasi Perjanjian *Sicomines*. Di sisi lain, penggunaan sumber yang beragam juga bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dalam penelitian melalui proses triangulasi data, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi dapat dibandingkan dan diverifikasi melalui berbagai dokumen yang relevan.

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif pendukung.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan sumber data utama untuk penelitian ini. Ini termasuk dokumen dari Perjanjian *Sicomines*, laporan dari organisasi internasional, laporan resmi pemerintah, studi akademis, dan laporan media internasional tentang implementasi perjanjian tersebut. Dengan menggunakan data ini, proses implementasi kerja sama,, mekanisme skema

Resource-for-Infrastructure (RFI) dinamika implementasi, amandemen perjanjian, hubungan antar pemangku kepentingan, dan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi perjanjian tersebut dianalisis.

Laporan media internasional juga dimasukkan ke dalam data kualitatif, karena berisi informasi deskriptif tentang perkembangan proyek, negosiasi kontrak, hasil audit, dan berbagai masalah yang dihadapi selama implementasi kerja sama. Laporan berita tidak digunakan sebagai satu satunya sumber fakta dalam penelitian ini, tetapi lebih sebagai sumber pelengkap yang membantu mengidentifikasi pola, masalah, dan dinamika dalam implementasi Perjanjian *Sicomines*.

2. Data Kuantitatif (Pendukung)

Selain data kualitatif, studi ini juga menggunakan data kuantitatif untuk mendukung analisisnya. Data kuantitatif yang digunakan meliputi produksi tembaga dan kobalt, volume investasi, volume pembiayaan proyek, kemajuan pembangunan infrastruktur, tren ekspor mineral, dan berbagai statistik ekonomi lainnya yang berkaitan dengan implementasi Perjanjian *Sicomines*.

Data kuantitatif tidak digunakan untuk menguji hipotesis statistik, tetapi lebih untuk memberikan penjelasan yang lebih objektif tentang temuan penelitian. Oleh karena itu, data tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi dan mendukung hasil analisis kualitatif, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi Perjanjian *Sicomines* dalam kerangka *Resource-for-Infrastructure (RFI)* di Republik Demokratik Kongo.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), penggunaan sumber data dari sekunder ini untuk meningkatkan ketepatan dalam analisis suatu fenomena. Pemanfaatan sumber data dapat memberikan informasi sehingga bisa menghasilkan temuan penelitian lebih

objektif dan menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data sekunder sangat memainkan peran penting, dapat memungkinkan peneliti untuk bisa memahami suatu fenomena berdasarkan dokumen, laporan, dan jurnal yang relevan

Maka dari itu, sumber data untuk penelitian ini secara eksklusif merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan dari lembaga internasional, publikasi ilmiah, dan data statistik yang relevan. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, diperoleh gambaran komprehensif tentang implementasi Perjanjian Sicomines antara Republik Demokratik Kongo dan Republik Rakyat Tiongkok dalam kerangka skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*. Data yang dikumpulkan berfokus pada mekanisme kerja sama, pelaksanaan proyek pertambangan dan pengembangan infrastruktur, perubahan ketentuan perjanjian, dan berbagai dinamika yang mempengaruhi proses implementasi perjanjian.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai lembaga internasional dan institusi yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*, *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *AidData*, serta berbagai laporan dan publikasi dari lembaga penelitian yang mengkaji hubungan ekonomi Tiongkok-Afrika. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, laporan kebijakan, serta dokumen resmi *Perjanjian Sicomines* dan amandemen sebagai sumber utama dalam proses analisis.

Untuk melengkapi data tersebut, penelitian ini juga menggunakan publikasi media internasional yang kredibel, seperti *Reuters*, *Bloomberg*, *Quartz Africa*, dan berbagai sumber pemberitaan lainnya yang memuat perkembangan terbaru terkait implementasi *Sicomines*, proses renegotiasi kontrak, audit proyek, serta berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan kerja sama. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara desain kerja sama, implementasi kebijakan, dan hasil pembangunan yang dihasilkan dalam skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*.

Dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang saling melengkapi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai implementasi *Perjanjian Sicomines*, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta keterkaitan antara dinamika implementasi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang dicapai di Republik Demokratik Kongo.

3.4 Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dipelajari. Creswell (2014) menyatakan bahwa analisis dokumen merupakan salah satu metode terpenting dalam penelitian kualitatif, khususnya di bidang kebijakan publik dan hubungan internasional, karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna, konteks, dan dampak kebijakan menggunakan sumber tertulis dan kredibel.

Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah metode pengumpulan data sistematis untuk memeriksa dokumen resmi, laporan institusional, dan publikasi ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu kebijakan atau perjanjian. Metode ini sangat relevan untuk penelitian tentang perjanjian internasional, mekanisme pembayaran, dan implementasi kerja sama antar negara, karena akses ke data primer seringkali terbatas.

Berdasarkan pendekatan ini, analisis dokumen digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Analisis dokumen dilakukan melalui tinjauan sistematis berbagai dokumen yang secara langsung terkait dengan Perjanjian *Sicomines* dan implementasi skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*

Dokumen yang akan dianalisis meliputi:

1. Dokumen perjanjian dan laporan implementasi kerja sama *Sicomines*;
2. Laporan evaluasi pembangunan infrastruktur dari lembaga internasional seperti *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*, *World Bank*, dan *International Monetary Fund (IMF)*;

3. Publikasi akademis berupa jurnal dan buku tentang kerja sama Tiongkok-Afrika, skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, ekonomi politik internasional;
4. Laporan kebijakan dan studi kelembagaan dari lembaga penelitian seperti *China Africa Research Initiative* dan *Natural Resource Governance Institute*;
5. Data statistik tentang perdagangan, pembiayaan infrastruktur, dan produksi mineral untuk mendukung analisis kualitatif.

Metode pengumpulan data ini dipilih karena paling sesuai dengan sifat penelitian yang analitis dan berorientasi pada kebijakan, yang berfokus pada penilaian implementasi perjanjian internasional. Analisis dokumen ini digunakan untuk mengkaji bagaimana desain perjanjian tercermin dalam praktik implementasi dan dinamika apa yang muncul selama implementasi kerjasama.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan metode pengumpulan data merupakan langkah penting, karena memengaruhi kualitas data yang akan dianalisis. Metode tersebut ditentukan oleh karakteristik penelitian, tujuan penelitian, dan jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Creswell (2014) mencatat bahwa studi kualitatif lebih berfokus pada pemahaman makna, proses, dan latar belakang suatu peristiwa sosial melalui pengumpulan data deskriptif. Oleh karena itu, metode pengumpulan data harus memberikan data terperinci tentang peristiwa yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat memahami hubungan antara aktor, aturan, dan pergerakan dalam peristiwa tersebut.

Dalam hubungan internasional, khususnya dalam penelitian tentang implementasi kerja sama internasional, kebijakan publik, dan perjanjian antar pemerintah, analisis dokumen merupakan salah satu teknik yang paling relevan. Creswell (2014) menekankan bahwa dokumen merupakan sumber data penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan informasi tentang proses pengambilan keputusan, latar belakang kebijakan, isi perjanjian, dan berbagai dinamika selama implementasi. Dokumen memungkinkan peneliti untuk

memperoleh data historis dan faktual yang menjelaskan perkembangan suatu kebijakan atau kerja sama internasional dari waktu ke waktu.

Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengevaluasi berbagai dokumen, baik cetak maupun elektronik. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang konteks, tujuan, isi, dan dampak suatu kebijakan atau program. Metode ini sangat cocok untuk menyelidiki implementasi perjanjian internasional, karena sebagian besar informasi yang diperlukan tersedia dalam bentuk dokumen resmi, laporan institusional, publikasi ilmiah, dan data statistik dari berbagai lembaga terkait.

Dengan latar belakang ini, analisis dokumen dipilih sebagai metode pengumpulan data utama untuk penelitian ini. Keputusan ini didasarkan pada fokus penelitian pada implementasi Perjanjian *Sicomines* skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* di Republik Demokratik Kongo Selain itu, studi ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perjanjian tersebut, serta hubungan antara kemajuan implementasi dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, analisis dokumen dianggap sebagai metode yang paling tepat, karena memberikan peneliti akses ke berbagai sumber informasi yang terkait erat dengan perjanjian, proses implementasinya, kemajuan proyek, dan evaluasi hasil kolaborasi.

Pengumpulan data melibatkan identifikasi, pemilihan, pengkategorian, dan peninjauan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen dipilih berdasarkan keandalan, relevansi, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Setelah itu, dokumen-dokumen ini diteliti guna mendapatkan informasi seputar rancangan kerja sama *Sicomines*, cara kerja skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, penyelesaian pembangunan sarana, kemajuan bidang tambang, tahapan perundingan ulang kontrak, dan unsur-unsur yang memengaruhi penerapan kesepakatan dari 2008 hingga periode terkini:

Dokumen yang akan saya kaji dalam studi ini mencakup:

- 1) Dokumen terkait perjanjian, perpanjangan, dan laporan pelaksanaan kerja sama *Sicomines* yang berisi detail tentang susunan kerja sama, pembagian

tugas para pihak, sistem pendanaan, dan perubahan syarat kontrak selama pelaksanaan;

- 2) Laporan penilaian dan publikasi resmi dari lembaga internasional seperti *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*, *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, dan AidData yang mengulas kemajuan proyek, pencapaian pembangunan infrastruktur, manajemen sumber daya alam, serta pengaruh ekonomi dari pelaksanaan Perjanjian *Sicomines*;
- 3) Publikasi ilmiah berupa buku, jurnal, artikel riset, tesis, dan disertasi yang menelaah hubungan ekonomi Tiongkok-Afrika, pelaksanaan kerja sama antarnegara, konsep *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, saling ketergantungan ekonomi, serta ekonomi politik global;
- 4) Laporan kebijakan, ringkasan kebijakan, dan kajian lembaga yang diterbitkan oleh pusat riset seperti *China Africa Research Initiative (CARI)*, *Natural Resource Governance Institute (NRGI)*, *International Growth Centre (IGC)*, dan berbagai pusat penelitian lain yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur di Afrika;
- 5) Data statistik pendukung yang berhubungan dengan hasil produksi tembaga dan kobalt, tren ekspor mineral, nilai investasi, kemajuan proyek infrastruktur, dan data ekonomi lain yang dipakai guna memperkuat analisis kualitatif dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi Perjanjian *Sicomines* dalam kerangka *Resource-for-Infrastructure (RFI)* di Republik Demokratik Kongo. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi Perjanjian *Sicomines* serta hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Selain itu, kesimpulan juga disusun untuk menjawab tujuan penelitian yang meliputi analisis implementasi Perjanjian *Sicomines*, identifikasi hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, serta penjelasan mengenai keterkaitan antara dinamika pelaksanaan dan hasil implementasi yang dicapai. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini ditujukan sebagai masukan bagi pengembangan kajian akademik maupun bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan berbasis sumber daya alam di masa mendatang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai implementasi Perjanjian *Sicomines* dalam kerangka *Resources-for-Infrastructure (RFI)* yang ada di Republik Demokratik Kongo dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam kerjasama tersebut memang belum sepenuhnya mencapai tujuan pembangunan infrastruktur sebagaimana yang sudah direncanakan sejak desain awal perjanjian dilakukan. Meskipun kerjasama ini berhasil mendorong untuk pengembangan di sektor pertambangan khususnya produksi tembaga dan kobalt yang di mana komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh industri Tiongkok, realisasi pembangunan infrastruktur ini berjalan sejauh lebih lambat dibanding dengan target yang telah ditetapkan. Sejak ditandatangani pada tahun 2008, implementasi *Sicomines* menunjukkan adanya Kesenjangan antara komitmen dalam pembangunan yang tertuang dalam isi kontrak dengan hasil yang dicapai di

lapangan. Berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan nasional fasilitas kesehatan, dan proyek energi mengalami keterlambatan serta belum mampunya mencapai target yang sudah direncanakan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Sicomines* berlangsung melalui banyak tahapan yang ditandai oleh perubahan kontrak, renegotiasi, audit, serta penyesuaian dalam mekanisme pembayaran. Pada tahap awal implementasinya rendah dalam produksi mineral ini juga belum mampu secara optimal dalam mengelola proyek yang dapat menyebabkan pendanaan atau pendapatan yang dihasilkan belum mampu cukup mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Pada kondisi tersebut tambah diperburuk oleh mekanisme pembayaran dalam skema *Resources- for-Infrastructure (RFI)* yang memprioritaskan pembayaran utang dan pengembalian investasi sebelum benar mendapat alokasi untuk pembangunan pabrik. Akibatnya meskipun aktivitas pertambangan ini terus berkembang secara baik manfaat pembangunan yang diterima oleh Republik Demokratik Kongo tidak sebanding dengan nilai ekonomi sumber daya mineral yang telah dipemanfaatan di pertambangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat banyak hambatan yang mampu mempengaruhi implementasi Perjanjian *Sicomines* seperti internal meliputi lemahnya kapasitas institusional pemerintah Republik Demokratik Kongo, rendahnya transparansi dalam pengelolaan proyek bahkan adanya keterbatasan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama di lapangan. Kelemahan yang telah disebutkan menyebabkan pemerintah ini mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian Selain itu, di posisi tawar Republik Demokratik Kongo yang relatif lebih lemah dibanding pihak Tiongkok ini turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan distribusi manfaat dalam kerjasama tersebut. Sementara itu, eksternal berupa fluktuasinya harga tembaga dan kobal di pasar internasional kemudian juga tekanan dari beberapa lembaga keuangan seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank* serta perubahan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi juga atas kestabilan pendanaan proyek dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut lagi, penelitian ini akan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dinamika pelaksanaan dengan hasil implementasi yang telah dicapai. fluktuasi harga mineral menyebabkan perubahan dalam kemampuan membiayai proyek yang berdampak secara langsung terhadap kecepatan pembangunan infrastruktur. yang telah dilakukan oleh Republik Demokratik Kongo menemukan berbagai ketidaksesuaian antara nilai sumber daya yang telah dipemanfaatan dengan manfaat pembangunan yang diterima negara, sehingga mendorong proses renegotiasi kontrak titik renegotiasi kontrak tersebut menunjukkan bahwa desain awal perjanjian ini memang belum mampu menjamin distribusi manfaat yang seimbang antara kedua belah pihak. perubahan kontrak yang telah terjadi secara berlangsung juga menyebabkan target pembangunan infrastruktur ini mengalami penyesuaian dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Studi ini meneliti berbagai aspek, termasuk teori saling interpendensi asimetris dan menyimpulkan bahwa hubungan antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok di bawah Perjanjian *Sicomines* menunjukkan pola ketergantungan yang tidak seimbang. Tiongkok memiliki keunggulan dalam hal pembiayaan, teknologi canggih, dan aspek operasional, sementara Republik Demokratik Kongo lebih bergantung pada investasi dan pengembangan infrastruktur Tiongkok. Ketidakseimbangan ini memberi Tiongkok posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah kerja sama. Akibatnya, implementasi Perjanjian *Sicomines* cenderung lebih berkontribusi pada pengamanan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan daripada mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merupakan tujuan utama kerja sama ini.

Secara keseluruhan, implementasi perjanjian *Sicomines* menunjukkan bahwa skema *Resources-for-Infrastructure (RFI)* tidak secara otomatis mengarah pada pembangunan yang efektif di negara penerima. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pemerintahan, efektivitas lembaga negara, keseimbangan kekuatan antar aktor (dalam konteks ini, negara dan bisnis), dan stabilitas situasi ekonomi global (dalam kasus Republik Demokratik Kongo). Kombinasi ini berarti bahwa hasil pembangunan yang diharapkan dari

kerja sama ini belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan tujuan awal perjanjian tersebut.

5.2. Saran

1. Saran Akademis

Penelitian selanjutnya harus mengkaji efektivitas skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)* di negara-negara berkembang lainnya secara lebih rinci untuk memungkinkan perbandingan komprehensif mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi model kerja sama ini. Lebih lanjut, penelitian dapat menggunakan pendekatan komparatif antara Perjanjian *Sicomines* di Republik Demokratik Kongo dan model serupa di Angola atau negara-negara Afrika lainnya untuk menjelaskan hubungan Tiongkok-Afrika dari perspektif politik ekonomi internasional.

2. Saran Praktisi bagi Republik Demokratik Kongo

Pemerintah Republik Demokratik Kongo harus meningkatkan kapasitas kelembagaannya, transparansi kerja sama, dan sistem pemantauannya di bidang kerja sama internasional di sektor sumber daya. Peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses implementasi sesuai dengan perjanjian dan bahwa hasil pembangunan lebih bermanfaat bagi penduduk. Lebih lanjut, pemerintah harus meningkatkan keterampilan negosiasinya dalam setiap negosiasi ulang untuk menjamin distribusi manfaat ekonomi dan pembangunan yang lebih adil.

3. Saran bagi Model Kerja Sama *Resource-for-Infrastructure (RFI)*

Dalam menjalankan skema *Resource-for-Infrastructure (RFI)*, memerlukan sistem pembiayaan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini termasuk mekanisme pemantauan independen untuk penggunaan dana dan penyelesaian pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, tujuan pembangunan harus terstruktur secara logis dan mempertimbangkan potensi fluktuasi harga komoditas global sehingga keberlanjutan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kinerja sektor komoditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, M. F. (2026, March 13). *DRC launches audit of \$9 billion Sicomines mining project, appoints Mayer Brown*. Retrieved from <https://miningfocusafrica.com/2026/03/13/drc-launches-audit-of-9-billion-Sicomines-mining-project-appoints-mayer-brown/>
- Agency, E. (2026, March 11). *DRC orders audit of 18-year Sino-Congolese mining deal*. Retrieved from <https://www.ecofinagency.com/news-industry/1103-53687-drc-orders-audit-of-18-year-sino-congolese-mining-deal>
- AidData. (2021, October 28). *Global Tiongkok: Infrastructure: The hidden debt problem*. AidData at the Institute for the Theory & Practice of International Development, William & Mary. <https://docs.aiddata.org/reports/hidden-debts/hidden-debts.html>
- AidData. (2023). *Project: Sino-Congolese Programme*. <https://Tiongkok.aiddata.org/project/73145>
- Alden, C. (2007). *Tiongkok in Africa: Partner, competitor or hegemon?* Zed Books.
- Almira Haryati Putri, & Luqman-nul Hakim. (2022). *Politik pertambangan joint-venture Sicomines: Transformasi ekonomi-politik Republik Demokratik (RDK) pascaperang sipil* [Skripsi].
- Bankable Africa. (2024, October 10). *DRC: Sicomines to spend \$5.5B on infrastructure development between 2024 and 2040*. Retrieved from <https://bankable.africa/en/news/1010-380-drc-Sicomines-to-spend-5-5b-on-infrastructure-development-between-2024-and-2040>
- Bankable Africa. (2026, March 8). *DRC launches audit to review implementation of Tiongkok-backed Sicomines project*. <https://bankable.africa/en/mining/0903-2533-drc-launches-audit-to-review-implementation-of-Tiongkok-backed-Sicomines-project>
- Bloomberg. (2017, October 9). *Congo halts Sicomines' copper exports, orders local refining*. Retrieved from <https://www.miningweekly.com/article/congo-halts-Sicomines-copper-exports-orders-local-refining-2017-10-09>
- Brautigam, D. (2009). *The Dragon's gift: The real story of Tiongkok in Africa*. Oxford University Press.
- Brautigam, D. (2020). A critical look at Chinese 'debt-trap diplomacy': The rise of a meme. *Area Development and Policy*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23792949.2019.1689828>

- Brautigam, D., & Gallagher, K. P. (2014). Bartering globalization: Tiongkok's commodity-backed finance in Africa and Latin America. *Global Policy*, 5(3), 346–352. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12138>
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On compliance. *International Organization*, 47(2), 175–205.
- Chinomso, M. B., Ali, D. A., & Bamidele, R. (2025). The impact of Chinese foreign direct investment on Nigeria's economic growth in the context of strategic management. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(11), 6995–7012. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.909000572>
- Corkin, L. (2013). *Uncovering African agency: Angola's management of Tiongkok's credit lines*. Ashgate.
- Extractive Industries Transparency Initiative. (2021). *Evaluation study: Sicomines agreement in the Democratic Republic of the Congo*. EITI.
- Fabbri, L. (2022). Tiongkok–Angola relations and resource-backed loans: Oil, infrastructure, and debt dynamics in Africa. *The Journal of Modern African Studies*, 60(4), 589–608. <https://doi.org/10.1017/S0022278X22000431>
- Fatshimétrie. (2024, Januari 27). *Mapambano makali dhidi ya visa ghushi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo*. Retrieved from [fatshimetrie.org: https://fatshimetrie.org/sw/international/2024/01/27/Sicomines-forced-to-pay-royalties-to-the-democratic-republic-of-congo-from-2024-a-major-step-forward-towards-equitable-distribution-of-income/](https://fatshimetrie.org/sw/international/2024/01/27/Sicomines-forced-to-pay-royalties-to-the-democratic-republic-of-congo-from-2024-a-major-step-forward-towards-equitable-distribution-of-income/)
- Foster, V., Butterfield, W., Chen, C., & Pushak, N. (2009). *Building Bridges: Tiongkok's Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa*. World Bank.
- Gilpin, R. (2001). *Global political economy*. Princeton University Press.
- Global Witness. (2011). *Tiongkok and Congo: Friends in need? The Sicomines agreement and its implications for infrastructure and mining development in the DRC*. Global Witness.
- Globalist, T. L. (2025, Januari 2). *Tiongkok in the DRC: Fuelling Progress or Deepening Regional Conflict?* Retrieved from The London Globalist: Khanna, G. (2025, Januari 2). *Tiongkok in the DRC: Fuelling Progress or Deepening Regional Conflict?* Retrieved from The London Globalist: <https://www.thelondonglobalist.org/post/Tiongkok-in-the-drc-fuelling-progress-or-deepening-regional-conflict>

- IGF.(2023). *Audit Report Sicomines*. (Via Reuters/Quartz)
<https://www.reuters.com/markets/commodities/congo-demands-17-bl-more-infrastructure-investments-Tiongkok-deal-2023-02-16/>
- IMF. (2006). *Democratic Republic of Congo: Poverty reduction strategy paper* (Country Report No. 06/66). International Monetary Fund.
- Isnaini, H. (2023, May). *Angkat jempol! Tak mau tambangnya dikuasai Tiongkok, (RDK) minta jatah lebih besar*. Retrieved from
[https://ekbis.sindonews.com/read/1108297/34/angkat-jempol-tak-mau-tambangnya-dikuasai-Tiongkok-\(RDK\)-minta-jatah-lebih-besar-1684998343/12](https://ekbis.sindonews.com/read/1108297/34/angkat-jempol-tak-mau-tambangnya-dikuasai-Tiongkok-(RDK)-minta-jatah-lebih-besar-1684998343/12)
- Jansson, J. (2011a). *The Sicomines agreement: Change and continuity in the Democratic Republic of Congo's international relations* (Occasional Paper No. 97). South African Institute of International Affairs.
- Jansson, J. (2011b). *The Sicomines agreement revisited*. Tiongkok Africa Research Initiative, Johns Hopkins University.
- Jansson, J. (2013). The *Sicomines* agreement revisited: Prudent Chinese banks and risk-taking Chinese companies. *Review of African Political Economy*, 40(135), 152–162. <http://www.jstor.org/stable/42003311>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1997). *Power and interdependence*. Longman.
- Landry, D. G. (2017, March 9). *Sicomines deal offers four clear Resource-for-Infrastructure lessons*. Natural Resource Governance Institute.
- Landry, D. G. (2018a). *The risks and rewards of Resource-for-Infrastructure deals: Lessons from the Congo's Sicomines agreement*. ECONSTOR.
- Landry, D. G. (2018b). *Lessons from the Congo's Sicomines agreement*. Duke University Sanford School of Public Policy.
<https://dukespace.lib.duke.edu/bitstreams/8a5866ae-3761-48aa-8367-7d98072828fc/download>
- Lee, C. K. (2009). Raw encounters: Chinese managers, African workers and the politics of casualization in Africa's Chinese enclaves. *The Tiongkok Quarterly*, 199, 647–666. <https://doi.org/10.1017/S0305741009990193>
- Magazine, L. G. (2025, May 15). *Sicomines: 17,5% d'infrastructures réalisés en 15 ans*. Retrieved from
<https://magazinelaguardia.info/2025/05/15/Sicomines-175-dinfrastructures-realises-en-15-ans/>

- Maiza-Larrarte, A., & Claudio-Quiroga, G. (2019). *The impact of Sicominex on development in the Democratic Republic of Congo*. *International Affairs*, 95(2), 423–446.
- Marysse, S., & Geenen, S. (2009). Win–win or unequal exchange? The case of the Sino-Congolese cooperation agreements. *The Journal of Modern African Studies*, 47(3), 371–396. <https://doi.org/10.1017/S0022278X09003914>
- Metal.com. (2025, March 22). *Tionggok refined copper imports up 14.39% YoY in February*. Metal.com.
- Mohan, G., & Lampert, B. (2013). Negotiating Tionggok: Reinserting African agency into Tionggok–Africa relations. *African Affairs*, 112(446), 92–110. <https://doi.org/10.1093/afraf/ads065>
- Moyo, D. (2012). *Winner take all: Tionggok's race for resources and what it means for Africa*. Basic Books.
- Mutai, N. (2025, February 1). *Tionggok's debt to Africa: A balancing act between development and dependency*. Democracy in Africa.
- Ngundu, M. (2025, March 5). *South Africa's trade deficit dilemma with Tionggok*. Institute for Security Studies.
- Nursasi, A., Hanifah, N., Handani, R. T., & Sarpini, S. (2024). Implementasi kebijakan integrasi ekonomi dan dampaknya terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(12), 429–440.
- Quartz Africa. (2023, April 11). *The Democratic Republic of Congo is auditing mining deals skewed in Tionggok's favor*. <https://qz.com/democratic-republic-of-congo-relook-at-Tionggok-mine-deals-1850318172>
- Rakotoseheno, S. (2024, March 25). *Sicomines: How the EITI in DRC helped secure 4 billion in additional revenue*. Retrieved from <https://eiti.org/blog-post/Sicomines-how-eiti-drc-helped-secure-4-billion-additional-revenue>
- Reuters. (2023, February 17). *Congo demands \$17 bln more in infrastructure investments from Tionggok deal*. <https://www.reuters.com/markets/commodities/congo-demands-17-bln-more-infrastructure-investments-Tionggok-deal-2023-02-16/>
- Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (Eds.). (2013). *The persistent power of human rights: From commitment to compliance* (Vol. 126). Cambridge University Press.

- Skaltsounis, P. (2025). The *Sicomines* Agreement: Strategic Partnership or Unequal Exchange between Tiongkok and Democratic Republic of Congo?. *African Studies Quarterly*, 23(2), 76-88.
- Simmons, B. A. (1998). Compliance with international agreements. *Annual Review of Political Science*, 1(1), 75–93.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development*. Pearson.
- Trading Economics. (2025). *Tiongkok exports to Kenya*. Trading Economics.
- World Bank. (2006). *DRC infrastructure diagnostic*. World Bank.
- World Bank. (2017). *Governance and development*. World Bank.
- World Bank. (2020). *Resource-backed loans in Sub-Saharan Africa*. World Bank.
- World Bank. (2025). *The Worldwide Governance Indicators: Revised methodology for measuring governance using perception data*. Washington, DC: World Bank Group.
- Wyk, M. V. (2026, March 13). *DRC launches audit of \$9 billion Sicomines mining project, appoints Mayer Brown*. Retrieved from <https://miningfocusafrica.com/2026/03/13/drc-launches-audit-of-9-billion-sicomines-mining-project-appoints-mayer-brown/>
- Xu, J. (2020). Chinese *Resource-for-Infrastructure* investments in Sub-Saharan Africa and the future of sovereign finance: The *Sicomines* case. *Michigan Journal of International Law*, 41, 614–652.
- Zimmerman, J. (2026). *Sicomines copper-cobalt mine: Chinese financing for transition minerals*. AidData.